

POLITICAL PARTIES' STRATEGIES IN RESPONDING TO MONEY POLITICS (CASE STUDY OF THE PROSPEROUS JUSTICE PARTY (PKS) IN BATU BARA REGENCY)

Strategi Partai Politik dalam Menyikapi Politik Uang (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Batu Bara)

Muhammad Wahyudi Arrasyd ^{1a(*)}, Faisal Riza^{2b}

¹² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

^a arrasydwahyu7@gmail.com

^b faisalriza@uinsu.ac.id

(*) Corresponding Author

arrasydwahyu7@gmail.com

How to Cite: Muhammad Wahyudi Arrasyd. (2025). Strategi Partai Politik dalam Menyikapi Politik Uang (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Batu Bara) doi: 10.36526/js.v3i2.5046

Received : 30-12-2024
 Revised : 10-02-2025
 Accepted : 18-02-2025

Keywords:

disiplin,
 motivasi kerja,
 kinerja karyawan

Abstract

This study aims to examine the strategy of the Prosperous Justice Party (PKS) in responding to the practice of money politics in Batubara Regency, North Sumatra Province. Money politics, as a phenomenon that undermines the integrity of democracy, has become a serious challenge for political parties, including PKS, which are committed to the values of social justice and political integrity in accordance with Islamic teachings. This research uses a qualitative approach with a case study design, where PKS in Batubara Regency is used as the main focus. Data collection methods include in-depth interviews with party chairmen, party members, and related parties, participatory observation of political activities, and analysis of official party documents such as campaign platforms and financial reports. Data analysis is carried out thematically to identify patterns and themes that emerge from the collected data. The results of the study show that PKS has a firm view of money politics, considering it as a practice that undermines democracy and political integrity. To anticipate money politics, PKS implements several strategies, including: (1) counseling to cadres and the public about the dangers of money politics, (2) strict monitoring of political activities, (3) enforcement of the party's code of ethics that prohibits the practice of money politics, (4) financial transparency and accountability, (5) collaboration with supervisory agencies and anti-corruption agencies, and (6) policy recommendations to tighten election regulations. In addition, PKS is also intensively conducting political education to the public, especially the younger generation, to increase awareness of the importance of choosing leaders based on integrity and ability, not because of material lures. Overall, this study contributes to understanding how Islamic political parties, particularly PKS, respond to the challenges of money politics in a local context. The findings of this study are expected to be a reference for the development of strategies to prevent money politics at the national and local levels, as well as strengthen the integrity of the democratic process in Indonesia.

PENDAHULUAN

Politik uang merupakan fenomena yang telah lama menjadi masalah dalam proses politik di Indonesia. Praktek politik uang yang melibatkan distribusi uang tunai, hadiah atau imbalan lainnya kepada pemilih telah mengancam integritas pemilih umum dan demokrasi secara menyeluruh (Sulhan, 2021). Fenomena ini tidak hanya merusak integritas proses politik, tetapi juga mengurangi kualitas representasi politik di parlemen dan melemahkan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Dalam hal ini, partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan dan menerapkan strategi yang efektif untuk menghadapi politik uang (Kurniawan, 2021).

Kabupaten Batubara yang terletak di Provinsi Sumatera Utara memiliki sejarah politik yang kaya dan kompleks. Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, dinamika politik Islam menjadi faktor penting dalam proses politik di daerah ini. Terkait hal tersebut, salah satu kelompok politik Islam yang aktif di Kabupaten Batubara adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki jumlah pengikut yang cukup besar. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai politik Islam lainnya kerap kali kesulitan beradaptasi dengan politik uang. Di satu sisi, mereka mendeklarasikan dedikasinya untuk keadilan sosial dan integritas politik sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, untuk mendapatkan dukungan pemilih dan kursi di parlemen, mereka juga terdesak untuk terlibat dalam politik uang.

Penelitian sebelumnya tentang politik uang juga dijelaskan oleh Hawing & Hartaman (2021) yang berjudul Politik Uang dalam Demokrasi di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018, yang menggunakan metode penelitian kuantitatif bentuk survey dan wawancara yang menggunakan responden 276 orang. Temuan studi menunjukkan bahwa pemilih di negara ekonomi kuat maupun miskin terdampak oleh praktik politik uang. Meski terjadi di mana-mana, politik uang menghalangi sebagian orang untuk memilih.

Penelitian selanjutnya dijelaskan dalam Jurnal Resiprokal yang berjudul Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, Berdasarkan hasil penelitian, faktor keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya mutu pendidikan masyarakat, dan kurangnya pengawasan menjadi penyebab utama maraknya politik uang di masyarakat (Riza, 2023). Senada dengan itu, hasil penelitian Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa menunjukkan dua gagasan, yaitu pertama, melakukan pendidikan politik dengan konsep preventif, dan kedua, melakukan pendidikan politik dengan konsep preventif (Fitriani et al., 2019).

Sedangkan dalam Jurnal Ilmu Adminitrasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang (*Money Politic*) dalam Setiap Pesta Demokrasi di Kampung Soryar Kabupaten Biak Timur Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa masyarakat sudah menyadari bahwa tujuan sumbangan keuangan adalah untuk membantu memilih politisi tertentu dan bahwa politik uang adalah tidak bermoral karena bertentangan dengan undang-undang pemilu (Wou, 2018).

Penelitian yang dilakukan Siregar & Maryanah (2022) dengan judul Fenomena Money Politic dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020 Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan pengaturan dalam pemilihan kepala daerah juga memungkinkan maraknya politik uang beserta unsur ekonomi, politik, sosial, dan budaya lainnya. Oleh karena itu, Bawaslu dan Sentra Gakumdu harus lebih tegas dalam menegakkan sanksi, merevisi peraturan TSM, dan mengedukasi pemilih tentang politik.

Sehingga penelitian ini mengisi kesenjangan dalam studi politik uang dengan memberikan perspektif baru tentang bagaimana partai berbasis Islam, khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), merespons praktik politik uang di Kabupaten Batu Bara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada dampak politik uang terhadap pemilih atau hasil pemilu, studi ini menyoroti strategi konkret yang diterapkan PKS, seperti pendidikan politik, penegakan kode etik, transparansi keuangan, serta kerja sama dengan lembaga pengawas untuk mencegah politik uang. Selain itu, jika penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei, studi ini mengadopsi metode kualitatif dengan studi kasus, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika internal partai dalam menghadapi politik uang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena politik uang, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif di tingkat lokal maupun nasional, serta menjadi referensi bagi kebijakan publik dalam memperkuat integritas demokrasi di Indonesia.

Peneliti ingin menyelidiki bagaimana partai politik menanggapi politik uang karena, seperti yang dijelaskan dalam sejarah masalah sebelumnya, belum banyak pembahasan tentang topik ini

dalam penelitian sebelumnya. Peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Strategi Partai Politik dalam Menyikapi Politik Uang (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Batubara).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi partai politik Islam, khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam merespon dan menghadapi praktik politik uang dalam pemilihan umum di Kabupaten Batubara. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PKS menyikapi dan menangani praktik politik uang dalam pemilu di Kabupaten Batubara.

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ilmu politik tentang taktik politik uang serta menjadi alat akademis yang berharga. Sementara itu, secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran politik, khususnya dalam program studi pemikiran politik Islam, dengan memberikan wawasan tentang metode penanganan politik uang.

METODE

Teori *political machine* yang dikemukakan oleh Scott Mainwaring (1999) menjelaskan bagaimana partai politik membangun jaringan patronase dan menggunakan sumber daya ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam sistem ini, partai atau kandidat sering kali memberikan insentif berupa uang, pekerjaan, atau bantuan sosial untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Politik uang menjadi salah satu mekanisme utama dalam strategi ini, di mana suara pemilih diperoleh melalui transaksi finansial daripada karena program atau ideologi yang kuat (Mainwaring, 1998).

Dalam konteks politik Indonesia, banyak partai politik terpaksa mengikuti pola *political machine* untuk tetap kompetitif, terutama di daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah. Karakteristik utama dari *political machine* adalah patronase dan klientelisme, mobilisasi pemilih berbasis insentif ekonomi, serta struktur jaringan yang kuat untuk mendistribusikan keuntungan politik. Namun, bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), praktik ini menjadi dilema karena bertentangan dengan prinsip moral dan ideologi Islam yang mereka junjung (Mainwaring, 1993).

PKS menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan realitas politik uang tanpa mengorbankan integritasnya. Oleh karena itu, beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh PKS antara lain membangun jaringan berbasis relawan dan simpatisan yang loyal, melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran pemilih tentang bahaya politik uang, serta menerapkan pendekatan berbasis pelayanan sosial sebagai alternatif patronase politik tradisional. Dengan cara ini, PKS dapat tetap bersaing dalam politik elektoral tanpa harus bergantung pada praktik politik uang yang merusak demokrasi dan legitimasi pemerintahan. Teori *political machine* memberikan wawasan tentang bagaimana politik uang beroperasi dan bagaimana partai seperti PKS dapat mencari strategi yang lebih etis untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

Kegiatan dan prosedur yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data dan kemudian menganalisis data tersebut sebagai langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan maksud dan tujuan tertentu dikenal sebagai metodologi penelitian (Saegana et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang strategi partai politik Islam dalam menyikapi politik uang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi nuansa dan konteks lokal yang mempengaruhi strategi partai keadilan sejahtera (PKS).

Studi kasus akan digunakan sebagai desain penelitian utama, dengan partai keadilan sejahtera (PKS) di kabupaten Batubara sebagai kasus studi. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami konteks politik lokal yang spesifik dan dinamika internal partai dengan lebih rinci.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan

ketua partai, anggota partai, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian di Kabupaten Batubara. Wawancara ini akan difokuskan pada pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka tentang strategi PKS dalam menyikapi politik uang. Selain itu, observasi partisipatif juga akan dilakukan untuk memahami secara langsung praktik politik dalam konteks umum di Kabupaten Batubara. Peneliti akan mengamati pertemuan kampanye, diskusi politik, serta berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan strategi politik PKS. Analisis dokumentasi pun akan dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi partai, platform kampanye, dan laporan keuangan yang relevan guna memahami strategi PKS dalam menghadapi politik uang.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis tematik terhadap data kualitatif yang terkumpul. Metode ini mencakup pencarian, pengkategorian, dan analisis pola tema yang muncul dalam hasil observasi, wawancara, serta analisis dokumen. Dengan pendekatan ini, pemahaman terhadap strategi PKS dalam menyikapi politik uang serta faktor-faktor yang memengaruhi pilihan dan tindakan mereka dalam lingkungan politik Kabupaten Batubara dapat diperoleh secara lebih mendalam.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, beberapa langkah akan diterapkan, seperti triangulasi data dan refleksi peneliti. Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data untuk mengonfirmasi temuan penelitian, sementara refleksi peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi serta mempertimbangkan potensi bias dalam proses pengumpulan dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sejarah Partai Keadilan Sejahtera

Gerakan dakwah mahasiswa dan mahasiswi di kampus-kampus baik di dalam maupun luar negeri menjadi model bagi PKS. Di Indonesia, gerakan tarbiyah yang mulai marak pada tahun 1990-an merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perjalanan dakwah para aktivis perguruan tinggi. Setelah sukses sebagai gerakan dakwah perguruan tinggi dan masyarakat, gerakan tarbiyah mulai menyadari jati dirinya dan berupaya memengaruhi hasil politik. Sebagai cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera (yang dilebur ke dalam PKS pada tanggal 20 April 2002/9 Jumadil Ula 1423 Hijriyah), Partai Keadilan (PK) berdiri pada tanggal 9 Agustus 1998 (Johnson, 2001).

Karena Partai PKS sebagian besar beranggotakan anak muda yang aktif di masjid kampus, maka masuk akal jika PKS digolongkan sebagai partai modernis. Namun jika ditelusuri lebih lanjut, ternyata beberapa pendiri PKS memiliki garis keturunan tradisional. Misalnya, Ahmad Hermawan adalah anggota Persatuan Umat Islam (PUI), Daud Rasyd Sitorus berasal dari lingkungan Jamaah Al Washliyah di Sumatera Utara, KH Rahmat Syafii adalah santri KH. Abdullah Syafii (pendiri Asy Syafiiyah dari Jakarta), dan Salim Segaf Al Jufri tercatat sebagai cucu pendiri Al Khairat yang sangat berpengaruh di kawasan Indonesia Timur. Mereka semua tercatat sebagai anggota Dewan Pendiri PKS. Beberapa nama memiliki asal usul tradisional yang signifikan, seperti Iskan Lubis (Sumatera), Ahzami Samiun Jazuli (Jawa), Mohammad Idris Abdus Somad (Sunda), dan H.M. Nasir Zein (Betawi). Karena alasan ini, sulit untuk menggolongkan PKS sebagai partai konvensional atau modern. Partai Keadilan mendeklarasikan diri di Masjid Al Azhar Jakarta pada tahun 1998.

Partai Keadilan memperoleh 1,4 juta suara pada tahun 1999, pemilihan pertama setelah reformasi. Ada tujuh kursi di DPR Indonesia, 105 anggota di DPRD Provinsi dan Kabupaten, dan satu menteri dalam pemerintahan Abdurahman Wahid (Gusdur). Pada 21 Mei 2000, Pada Munas PK I yang diselenggarakan di Hotel Bumiwiyah, Depok, Hidayat Nur Wahid terpilih menjadi Presiden PKS, menggantikan Nurmahmudi Ismail yang diangkat menjadi Menteri Kehutanan. Namun, pembatasan Undang-Undang Pemilih Umum dan ambang batas elektoral menghambat upaya PK untuk menebar benih dakwah di ranah politik, sehingga PK tidak dapat ikut serta dalam pemilu 2004.

Sidang Majelis Syuro ke-XII Partai Keadilan pada tanggal 17 April 2003 merekomendasikan untuk bergabung dengan PKS, dan pada tanggal 20 April 2003, Partai Keadilan Sejahtera

diumumkan di hadapan 40.000 orang di perempatan Monas Jakarta. Pada tanggal 4 Juni 2003, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa DPP PKS telah lolos verifikasi, dan sebulan kemudian, PK secara resmi bergabung dengan PKS. PKS memperoleh 8,4 juta suara pada pemilu 2004, dan Ir. Tifatul Sembiring terpilih sebagai presiden PKS dalam rangka mendorong budaya reformasi: pejabat publik jangan jadi pemimpin parpol. PKS Sumatera Utara berhasil meraih 34 kursi di DPRD Kabupaten/Kota, 6 kursi di DPRD Provinsi, dan 1 kursi di DPR RI pada Pemilu 2004. Terbukti, PKS berhasil melampaui rekor perolehan suara sebelumnya yang mencapai 18.200 suara dan mencetak rekor baru (Jayus, 2016).

Perkembangan dan capaian pemilu PKS di Batu Bara

Sebagai partai yang memiliki slogan “Bersama melayani rakyat”, PKS telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. PKS dengan gencar melakukan perekrutan kader-kader muda potensial guna mengedukasi milenial untuk aktif berpartisipasi dalam panggung demokrasi. Hadirnya kader-kader muda PKS bukanlah untuk menyaingi para kader terdahulu, melainkan untuk mengedukasi para pemuda agar mampu menuangkan ide serta gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan dan pembangunan negeri ini.

PKS juga secara rutin melakukan rakerda, konsolidasi, kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan di Batu Bara. Hal tersebut tentunya dilakukan untuk membangun semangat dan kerja sama seluruh anggota partai dengan masyarakat sekitar serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PKS. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme masyarakat Batu Bara yang tinggi terhadap setiap kegiatan PKS. Selain itu, PKS juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Batu Bara. Bekerjasama dengan H. Ansory Siregar, LC., tokoh masyarakat Batu Bara, dan pengurus PKS Batu Bara, salah satunya adalah melakukan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi narkoba.

Berbagai kegiatan yang diselenggarakan tersebut tentunya juga bertujuan untuk memenangkan suara rakyat ketika pesta demokrasi diselenggarakan. Untuk pemilu tahun 2024, terbukti PKS berhasil meraih 4 kursi legislatif. Hal tersebut tentunya merupakan suatu hal yang baik. Dikarenakan adanya peningkatan raihan kursi dari periode sebelumnya yang hanya memenangkan 3 kursi legislatif. Tentunya, para pengurus PKS Batu Bara sangat berterima kasih kepada masyarakat Batu Bara dikarenakan telah memberikan kepercayaan kepada para kader PKS untuk menyampaikan suara rakyat, serta menjadi perwakilan rakyat di kancah politik.

Dukungan Masyarakat terhadap PKS di Batu Bara

Tentu saja, tidak mungkin berbicara politik tanpa melibatkan keterlibatan publik. Riza (2021) menegaskan bahwa kerangka kerja yang ketat dibentuk oleh hubungan antara demokrasi, legitimasi, dan keterlibatan politik. Hal ini terjadi karena kredibilitas yang diberikan masyarakat terhadap jalannya sistem pemerintahan selalu sangat dipengaruhi oleh hubungan antara keterlibatan partai politik dan proses demokrasi. Misalnya, ketika pemilihan umum nasional diadakan, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih dan dapat memilih calon pemimpin daerah berdasarkan kepentingan mereka.

Melihat perkembangan PKS sekarang ini, tentunya tidak terlepas dari besarnya dukungan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh PKS. Dalam hal ini, masyarakat dianggap sebagai *support system* terbesar yang telah turut memberikan sumbangsih dan kepercayaan sehingga PKS dapat terus melakukan perbaikan dalam segala bidang serta dapat terus melayani rakyat (Tarigan, 2013).

PKS merupakan salah satu partai yang cukup dikenal di Batu Bara. Banyak kader PKS yang terdiri dari berbagai macam profesi masyarakat di Kabupaten Batubara. Hal ini menjelaskan bahwasannya, PKS merupakan partai yang cukup dipercaya masyarakat dan menjadi wadah untuk saling bertukar gagasan kreatif dalam dunia politik. PKS juga gencar melakukan perekrutan kader dari generasi milenial, hal ini bertujuan agar citra PKS di mata anak-anak muda dipandang sebagai

partai yang tepat bagi para generasi muda untuk menuangkan ide-ide serta gagasan demokrasinya. Salah satu upayanya adalah memberdayakan pengkaderan pada generasi muda serta penerapan media sosial positif dengan membubuhkan caption yang berisi ide-ide dan motivasi yang menyoal kawula muda dan untuk membangkitkan jiwa-jiwa politik pada generasi muda (Achmad et al., 2022).

Terlepas dari besarnya dukungan masyarakat Batu Bara terhadap PKS, tentunya PKS masih memiliki beberapa kendala dalam mewujudkan optimalisasi partisipasi politik. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap politik. Mereka kurang memahami bahwasannya politik dapat menjadi alat untuk menyalurkan aspirasi, menuntut hak-hak dan perubahan serat dapat mempengaruhi kebijakan publik (Arrasyid et al., 2020).

Tidak dapat dipungkiri, bahwasannya masih banyak masyarakat yang tidak ingin terlibat dalam dunia politik. Hal ini tentunya menjadi hambatan dalam mencapai optimalisasi tersebut. Hambatan yang lainnya yaitu masih kurangnya SDM yang mumpuni untuk terjun langsung dan menjalankan tugas-tugas di lapangan. Masih banyak dari anggota kader yang dianggap belum mumpuni untuk menanggungjawab sebuah tugas lapangan. Lebih dari pada itu, PKS berkomitmen agar terus meningkatkan kualitas para kadernya dan terus menyebarkan pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat Batu Bara. Hal ini tentunya bertujuan agar Batu Bara semakin maju dan memiliki kader yang mampu tampil pada kancah legislatif berikutnya.

Pembahasan

Politik Uang

Politik uang adalah praktik pertukaran uang untuk jabatan, kebijakan, dan pilihan politik yang konon merupakan kepentingan terbaik rakyat, tetapi sebenarnya merupakan kepentingan terbaik individu, organisasi, atau partai yang memberikan dukungan. Penggunaan imbalan berupa uang untuk mempengaruhi orang lain (masyarakat) dikenal sebagai politik uang. Hal ini juga dapat dilihat sebagai jual beli suara dalam perebutan kekuasaan dan politik, serta penyaluran dana, baik untuk partai maupun pribadi, untuk mempengaruhi keputusan pemilih (Muhtadi, 2023).

Dalam setiap proses rekrutmen politik, termasuk pemilihan kepala daerah, politik uang harus diakui sebagai gangguan yang signifikan. Hal ini terjadi karena politik merupakan area negosiasi. Politik uang merupakan salah satu jenis negosiasi komersial konvensional yang akan segera menggantikan tawar-menawar politik yang tidak didukung oleh masalah kompetensi. Upaya menyuap pemilih dengan menawarkan uang atau jasa sebagai imbalan atas preferensi suara mereka dikenal sebagai politik uang. Patronase dan klientelisme akan menjadi hasil dari aktivitas politik uang ini (Muhtadi et al., 2020).

Klientelisme merupakan salah satu bentuk komunikasi antarpribadi yang ditandai dengan dinamika kekuasaan dan tugas yang tidak seimbang. Selain itu, hal ini dibedakan dengan aktivitas patron yang memberikan akses kepada pelanggan dalam bentuk rekomendasi tertentu, untuk membangun pola hubungan perdagangan timbal balik yang menguntungkan kedua belah pihak (Zen, 2017).

Di sisi lain, patronase melibatkan politisi yang membagi pendapatan dan memberikan sesuatu kepada setiap pemilih, karyawan, atau aktivis kampanye secara terpisah. Memperoleh dukungan politik mereka adalah tujuannya (Muhtadi, 2019). Politik uang terkait pemilu akan menghasilkan pegawai negeri yang tidak jujur. Proses pemilihan umum dan pemilihan daerah, yang didorong oleh politik uang, merupakan akar penyebab korupsi dalam pemerintahan (Hariyanto, 2021).

Dari sudut pandang mereka yang skeptis terhadap politik uang, pertumbuhan politik uang juga tidak dapat dipisahkan. Politik uang tumbuh subur dalam proses demokrasi Indonesia, khususnya demokrasi akar rumput (pemilihan kepala desa), karena masyarakat sudah dianggap biasa tidak menyadari risikonya. Karena mereka tidak percaya bahwa politik uang adalah perilaku yang harus dihindari, mereka pun mengizinkannya (Nail, 2019).

Oleh karena itu, menawarkan atau mengancam untuk menyuap seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya atau agar hak pilihnya digunakan dengan cara tertentu selama pemilihan umum dikenal sebagai politik uang. Pemberian dapat dilakukan dengan uang tunai atau barang dagangan. Dalam menentukan siapa yang berhak memilih dalam setiap pemilihan umum, politik uang biasanya digunakan untuk memengaruhi orang (Aspinall & Hicken, 2022).

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan kepala desa, daerah, maupun nasional, politik uang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tentu saja merusak nama baik politik yang seharusnya dijalankan secara terbuka dan jujur. Dalam hal ini, masyarakat secara keseluruhan tentu akan mengalami kerugian yang sangat besar. Para pemilih akan dengan bebas memberikan suaranya untuk calon yang bahkan tidak mereka kenal karena politik uang. Kekeliruan yang sudah menjadi budaya ini diyakini akan terus berlanjut dari generasi ke generasi hingga tidak ada lagi pemilu yang benar-benar bersih (Satria, 2019).

Lebih jauh, korupsi dan penipuan publik disebut-sebut berakar dari politik uang ini. Untuk melegalkan politik uang ini, politisi tertentu tentu membutuhkan dana yang sangat besar selama masa kampanye. Untuk memancing rasa ingin tahu publik dan mendapatkan dukungan mereka, politisi tersebut tentu akan membuat janji-janji yang menyesatkan. Namun, masyarakat umum sering kali tidak bertanggung jawab dan mengabaikan dampak-dampak ini. Akibatnya, begitu berkuasa, politisi tersebut akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mendapatkan kembali dana kampanyenya, sebuah praktik yang dikenal sebagai korupsi investigatif. Lebih jauh, ia tidak akan peduli dengan janji-janji yang ia buat ketika ia membutuhkan suara.

Bagaimana pandangan partai PKS tentang politik uang?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Abdul Afriyan Marpaung, S.K.M selaku Ketua DPD PKS Batu Bara, beliau mengatakan bahwa:

"...PKS sampai detik ini melarang melegalkan politik uang. Hal tersebut jelas akan mencoreng nama baik PKS serta nilai-nilai dan komitmen yang telah ditetapkan. Kami berusaha sebaik mungkin tetap menjaga integritas partai dan kepercayaan masyarakat. Semoga kedepannya, para kader PKS dapat menjadi contoh baik di mata masyarakat dan terus menghimbau serta mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh dengan politik uang". (Hasil wawancara 07 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwasannya PKS sejauh ini menjaga marwah partai agar tidak terlibat dalam kegiatan penyelewengan suara, baik berupa pemberian uang, maupun sembako. PKS juga tak henti-hentinya terus berupaya mengedukasi masyarakat agar memilih pemimpin karena kemampuan dan integritasnya. Bukan dari pihak mana yang lebih banyak memberikan uang.

PKS (Partai Keadilan Sejahtera) menilai politik uang sebagai praktik yang merusak demokrasi karena telah mengubah proses pemilihan umum menjadi transaksi bisnis yang mengorbankan kepentingan publik. PKS sangat menegaskan kepada seluruh kadernya yang ikut berpartisipasi dalam perebutan kursi legislatif agar tidak menggunakan politik uang demi memenangkan suara rakyat.

Hal ini sesuai dengan pendekatan Mada Sukmajati dan Edward Aspinall, yang mendefinisikan politik uang sebagai pembelian suara. Keduanya menggolongkan pembelian suara sebagai ketika kandidat secara sistematis menawarkan uang tunai atau hadiah kepada orang-orang beberapa hari sebelum pemilihan dengan harapan tersirat bahwa penerima akan membalas budi dengan memberikan suara untuk pendonor. "Menawarkan barang kepada individu tertentu sebelum pemilihan sebagai imbalan atas suara mereka" adalah bagaimana Finan dan Schechter mendefinisikan pembelian suara.

Partai keadilan sejahtera (PKS) memiliki pandangan tegas tentang politik uang, yang mereka anggap sebagai praktik yang merusak integritas demokrasi. Dalam pandangan PKS, politik uang mengubah proses pemilihan umum dari yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat menjadi sekedar transaksi bisnis. Ini berpotensi mengorbankan kepentingan publik karena para

calon yang terpilih melalui praktik ini cenderung lebih loyal kepada pemberi uang ketimbang kepada konsituen mereka.

PKS percaya bahwa politik uang menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi pemilihan, di mana hanya kandidat dengan sumber daya financial yang besar yang dapat bersaing secara efektif. Hal ini juga berkontribusi pada korupsi sistematis, karena pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung akan mengembalikan "investasi" mereka melalui kebijakan yang menguntungkan para penyokong mereka.

Untuk mengatasi isu ini, PKS mendorong pendidikan politik yang lebih baik, transparansi dalam proses pemilu, serta penegakan hukum yang ketat terhadap praktik politik uang. Dengan langkah-langkah tersebut, mereka berharap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan memastikan bahwa pemilu benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan aspirasi rakyat. PKS berkomitmen untuk mengembangkan politik lewat gagasan yang kreatif, inovatif dan solutif demi tercapainya pesta demokrasi yang bersih dan terhindar dari politik uang.

Sejalan dengan hal di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Suminah selaku anggota DPRD Batu Bara mengenai berhasilnya kader PKS meraih kursi legislatif meskipun tanpa politik uang. Beliau, mengatakan bahwa:

"...Keberhasilan kami mewakili PKS untuk bertarung di panggung politik tentunya dengan cara yang halal. Bukan dengan alasan politik uang, ataupun lelang jabatan. Kami para kader PKS dididik untuk menjadi pengayom masyarakat yang tidak diperbolehkan menggunakan cara yang illegal demi memperoleh suara rakyat. Kami semua berjuang dengan visi-misi yang kami bawa dan murni tujuan kami sebagai wakil rakyat yang ikut menyuarakan kesejahteraan terkhusus masyarakat Batu Bara". (Hasil wawancara 07 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya tidak semua jabatan diperoleh dari hasil *money politic*. Masih ada kader-kader jujur yang benar-benar murni ingin membawa visi-misi mereka demi kesejahteraan rakyat. Masyarakat juga diharapkan agar memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas, kritis dan cerdas. Semoga kedepannya masyarakat semakin sadar akan pentingnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan terhindar dari segala bentuk *money politic* maupun *black campaign*.

Bagaimana strategi PKS untuk mengantisipasi politik uang?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman. S.E., M.Si selaku Sekretaris DPD PKS Batu Bara, beliau mengatakan bahwa:

"....Tentunya di PKS kita sangat melarang kader untuk melakukan politik uang. Oleh sebab itu, sebagai bentuk komitmen PKS dalam melaksanakan pemilu yang adil, maka PKS menerapkan strategi yang dapat meminimalisir atau bahkan meniadakan politik uang tersebut. Strategi itu diantaranya yaitu, penyuluhan kepada seluruh kader dan masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi politik uang, pemantauan dan penegakan kode etik". (Hasil wawancara 07 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh kesimpulan bahwa, strategi PKS dalam mengantisipasi politik uang menggunakan pendekatan yang beragam termasuk penyuluhan kepada kader dan masyarakat tentang bahaya politik uang, pemantauan ketat terhadap aktivitas politik, serta penegakan kode etik partai dan melarang praktik politik uang, melakukan transparansi keuangan dan akuntabilitas, kebijakan terkait kode etik dan dana politik, kolaborasi dengan lembaga pengawas dan badan anti korupsi dan melakukan rekomendasi kebijakan undang-undang.

Partai keadilan sejahtera (PKS) memiliki strategi komprehensif untuk mengantisipasi politik uang, yang mencakup beberapa pendekatan utama. Pertama, partai ini aktif melakukan penyuluhan kepada kader dan masyarakat tentang bahaya politik uang. Melalui program pendidikan politik, PKS menjelaskan dampak negatifnya terhadap integritas demokrasi dan bagaimana praktik ini merugikan kepentingan politik. Kedua, PKS menerapkan pemantauan ketat terhadap aktivitas politik, termasuk

pengawasan pada setiap tahap pemilu. Ini melibatkan pengumpulan laporan dari kader di lapangan untuk memastikan tidak ada transaksi ilegal yang terjadi. Dengan cara ini, PKS berupaya menjaga kejujuran dalam pemilihan.

Selanjutnya, PKS menegakkan kode etik yang jelas dan tegas, di mana semua anggota dilarang terlibat didalam praktik politik uang. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan sanksi yang berat. Transparansi keuangan juga menjadi fokus utama, PKS berusaha menjelaskan sumber dan penggunaan dana politik secara terbuka, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Partai ini juga menjalin kolaborasi dengan lembaga pengawas dan badan anti korupsi untuk memperkuat upaya pengawasan terhadap praktik politik uang. Kerja sama ini mencakup pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan melaporkan praktik korupsi.

Seperti yang kita ketahui, bahwasannya politik uang ini sering kali menyasar masyarakat kalangan menengah ke bawah. Mereka beranggapan bahwa masyarakat pada kalangan tersebut lebih mudah untuk dikendalikan dan dibeli suaranya, tanpa peduli siapa calonnya, bagaimana latar belakangnya, serta bagaimana kinerjanya (Fitriani et al., 2019). Oleh sebab itu, PKS dengan gencar melakukan kegiatan serta memperkenalkan setiap kadernya yang akan maju pada pesta demokrasi. Hal ini sebagai upaya agar nantinya masyarakat akan lebih mengenal para calon legislatif serta masyarakat dapat menimbang keputusannya agar lebih bijak dalam memberikan suara kepada orang-orang yang memang berdedikasi untuk menyampaikan aspirasi rakyat.

Pencegahan praktik politik uang dan mahar politik melalui peraturan perundang-undangan, lembaga terkait, tahapan pemilu, pengawasan, dan praktik terbaik yang diadopsi negara lain dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia merupakan beberapa saran untuk memperbaiki cara penanganan politik uang. Pahlevi & Amrullohi (2020) menyatakan bahwa pendekatan penelitian untuk mencegah praktik politik uang dan mahar dilihat dari perspektif penguatan lembaga, hukum, pemangku kepentingan terkait, dan faktor moneter. Sebelum, selama, dan setelah pemilu, proses pencegahan politik uang dapat dimulai. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah:

1. Memperkuat Aturan Hukum Melalui Sanksi Pidana dan Administratif
2. Meningkatkan Kapasitas dan Efektifitas Lembaga Pemerintahan (Infrastruktur dan Suprastruktur)

Selain itu, PKS secara aktif mendorong rekomendasi kebijakan yang berhubungan dengan regulasi pemilu, termasuk revisi undang-undang yang dapat memperketat kontrol terhadap sumbangan politik dan dana kampanye. Dengan pendekatan-pendekatan ini, PKS bertujuan untuk menciptakan lingkungan politik yang bersih, adil, dan transparan, serta membangun kultur yang menolak segala bentuk politik uang. Dengan demikian, diharapkan setiap kali diadakan pemilu baik itu pilkada ataupun sebagainya dapat menjadi momentum bagi konsolidasi demokrasi yang lebih baik lagi. Masyarakat diharapkan semakin bijak dalam memilih pemimpin yang tepat. Pilihlah pemimpin yang memang mampu dan berintegritas.

PENUTUP

Kesimpulan dari uraian mengenai strategi PKS dalam mengantisipasi politik uang menunjukkan bahwa partai ini secara sistematis dan terpadu berkomitmen untuk mengatasi isu yang mengancam integritas demokrasi. PKS mengadopsi pendekatan multifaset yang mencakup penyuluhan dan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran kader dan masyarakat mengenai dampak negatif politik uang.

Selain itu, dengan penerapan pemantauan ketat terhadap aktivitas politik, PKS berupaya mengidentifikasi dan mencegah praktik korupsi sejak dini. Penegakan kode etik yang jelas dan tegas serta larangan terhadap praktik politik uang, menunjukkan komitmen PKS untuk memastikan akuntabilitas dalam partai.

Transparansi keuangan juga diutamakan sebagai upaya untuk membangun kepercayaan publik, sehingga sumber dan penggunaan dana politik dapat dipertanggungjawabkan. Kerja sama dengan lembaga pengawas dan badan anti korupsi memperkuat mekanisme kontrol eksternal, yang penting untuk menjaga integritas pemilu.

Akhirnya, PKS secara aktif mendorong revisi kebijakan yang dapat memperkuat regulasi pemilu, sehingga menciptakan kerangka hukum yang mendukung praktik politik yang adil dan bersih. Dengan langkah-langkah ini, PKS berupaya tidak hanya untuk mengurangi politik uang, tetapi juga untuk membangun kultur politik yang menolak korupsi, sehingga menciptakan sistem demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, I. A., Tanjung, H. S., Nay, F. A., & Atty, Jimmy Charter. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Politik Sebagai Program Pendidikan Nonformal Study Kasus di Partai Keadilan Sejahtera. *Journal of Education Sciences: Foundation & Application*, 1(1), 27–38. <https://doi.org/10.161985/JESFA.V1I1.8>
- Arrasyid, S., Hursaini, H., & Abidin, Z. (2020). Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 1998 – 2017. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 5(1), 77–86. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/15084>
- Aspinall, E., & Hicken, A. (2022). Guns for Hire and Enduring Machines: Clientelism Beyond Parties in Indonesia and The Philippines. In *Varieties of Clientelism* (pp. 137–156). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003352259-8>
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>
- Hariyanto, H. (2021). Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 360–379. <https://doi.org/10.26623/HUMANI.V11I2.4057>
- Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang dalam Demokrasi di Indonesia. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 45–53. <https://doi.org/10.24076/JSPG.2021v3i1.533>
- Jayus, J. (2016). Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 221. <https://doi.org/10.31078/jk1022>
- Johnson, P. (2001). *Partai Politik dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, dalam *Panduan Parlemen Indonesia*. Yayasan API.
- Kurniawan, L. J. (2021). *Keadaban Politik: Membincang Kekuasaan Merawat Kekuasaan*. Gramedia.
- Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, Multipartism, and Democracy. *Comparative Political Studies*, 26(2), 198–228. <https://doi.org/10.1177/0010414093026002003>
- Mainwaring, S. (1998). Party Systems in the Third Wave. *Journal of Democracy*, 9(3), 67–81. <https://doi.org/10.1353/jod.1998.0049>
- Muhtadi, B. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 55–74. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V5I1.413>
- Muhtadi, B. (2023). *Votes for Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi*. FISIP UIN Syarif Hidayatullah.
- Muhtadi, B., Gautama, C., Putro, G. A., & Rofiqi, Z. (2020). *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nail, M. H. (2019). Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 245. <https://doi.org/10.35586/.v5i2.770>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V6I1.611>

- Riza, F. (2021). Islam and Nationalism: The Role of the Universitas Al Washliyah In the Era of Post Independent 1950s. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 5(1), 1–36. <https://doi.org/10.30821/jcims.v5i1.7971>
- Riza, F. (2023). Echoing Syari'ah in City Spaces: The Framing Process and Political Mobilization of the Islamic Movement in North Sumatra. *Ulumuna*, 27(1), 65–88. <https://doi.org/10.20414/ujs.v27i1.610>
- Saegana, U., Lawelai, H., & Dema, H. (2023). *Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik (Teori & Referensi Berbasis Studi Kasus)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V5I1.342>
- Siregar, M. C., & Maryanah, T. (2022). Fenomena Money Politics dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 141–158. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>
- Sulhan, M. (2021). *Dramaturgi Politik Indonesia: Membaca Talkshow Politik Menyingkap Wajah Politisi*. Gramedia.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam : Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*. Universitas Medan Area.
- Wou, A. (2018). Persepsi Masyarakat terhadap Politik Uang (Money Politic) dalam Setiap Pesta Demokrasi di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 13(1), 8–14. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v13i1.58>
- Zen, H. R. (2017). Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah. *Al-'Adalah*, 12(1), 525–540. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I1.205>